

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PERAN BADAN PERTANAHAN PROVINSI GORONTALO DALAM
MENYELESAIKAN KASUS PERTANAHAN DITINJAU DALAM PASAL
1 PERATURAN MENTRI AGRARIA NO 11 TAHUN 2016
(STUDI KASUS BPN PROVINSI GORONTALO)**

Oleh:

DESRYANI S BOTUTIHE

NIM : 271414196

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing I

Pembimbing II

Hj.Nirwan Junus, SH., MH
Nip. 196906022000032001

Dolot Alhasni Bakung, SH., MH
Nip. 198508272009121005

Mengetahui :

Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Suwitno Yutye Imran, SH., MH
NIP: 198306222009 121 004

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI GORONTALO DALAM
MENYELESAIKAN KASUS PERTANAHAN DITINJAU DALAM PASAL 1
PERATURAN MENTRI AGRARIA NO 11 TAHUN 2016
(STUDI KASUS BPN PROVINSI GORONTALO)

Oleh:

DESRYANI S BOTUTIHE

NIM : 271414196

Telah diuji dan dipertahankan didepan dewan penguji

Hari/ Tanggal :

Pukul : WITA

Komisi Penguji :

1. Hj. Mutia CH Thalib, SH., MH

Nip. 196907041998022001

(.....)

2. Novendri M. Nggilu, SH., MH

Nip. 198911272014041001

(.....)

3. Hj. Nirwan Junus, SH., MH

Nip. 196906022000032001

(.....)

4. Dolot Alhasni Bakung, SH., MH

Nip. 198508272009121005

(.....)

Gorontalo, 2018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH., M.Hum

NIP: 19701105 199703 1 001

ABSTRAK

DESRYANI S. BOTUTIHE, 271414196, dengan judul skripsi “PERAN BPN PROVINSI GORONTALO DALAM MENYELESAIKAN KASUS PERTANAHAN DITINJAU DALAM PERATURAN MENTRI AGRARIA NO 11 TAHUN 2016”. Dibawah PEMBIMBING 1 NirwanJunus, SH., MH dan PEMBIMBING II Dolot Alhasni Bakung, SH., MH, PROGRAM STUDI ILMU HUKUM, FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan Peran Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo dalam menyelesaikan sengketa tanah ditinjau dalam Peraturan Menteri Agrarian No. 11 tahun 2016 serta untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi kendala atau penghambat penyelesaian sengketa tanah di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo.

Penelitian ini bersifat empiris dengan teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara penelitian lapangan yakni wawancara dan studi kepustakaan, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu dengan pengumpulan data, mengkuualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah. Selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya, sehingga pada akhirnya dapat diketahui seperti apa Peran Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo dalam menyelesaikan sengketa tanah ditinjau dalam Peraturan Menteri Agrarian No. 11 tahun 2016.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan, dapat bertindak secara administratif menyelesaikan sengketa pertanahan yang menjadi kewenangannya dan selain kewenangannya. Peraturan Kepala BPN No.11 Tahun 2016 menjadi dasar kewenangan BPN sebagai mediator yang membantu para pihak mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Selanjutnya, faktor-faktor yang menjadi kendala atau penghambat penyelesaian sengketa tanah di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo adalah karena adanya faktor internal dan eksternal.

Kata Kunci : Penyelesaian Kasus Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo

ABSTRACT

BOTUTIHE, DESRYANI S. 271414196. "THE ROLE OF STATE LAND AGENCY OF GORONTALO PROVINCE IN LAND DISPUTE SETTLEMENT AS REFERRED TO THE REGULATION OF MINISTRY OF AGRARIAN AFFAIRS NO. 2 OF 2006". PRINCIPAL SUPERVISOR: Nirwan Junus, SH., MH, CO-SUPERVISOR: Dolot Alhasni Bakung, SH., MH. DEPARTMENT OF LAW STUDIES, FACULTY OF LAW, UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO.

This research intends to elaborate the role of State Land Agency of Gorontalo province in land dispute settlement as referred to the Regulation of Ministry of Agrarian Affairs No. 11 of 2006, and to identify factors obstructing the agency's effort to settle land disputes.

The empirical study employed field observation, interview, and library research to collect the data. Moreover, the data were analyzed qualitatively in steps i.e.: data collection, qualification and application of theories to the problems, and conclusion formation from the research sources. Further, the data were presented descriptively, i.e. by elaborating and describing the data in order to provide comprehensive and strategic explanation of the research findings to address the research questions.

The result shows that the State Land Agency has responsibility to conduct official affairs in field of agrarian, thus making the agency administratively capable to settle land disputes within or outside its authority. The authority is based on Regulation of Head of State Land Agency No. 11 of 2016, which affirms that the agency acts as a mediator to help resolve the disputes without coercive way. Further, the internal and external factors are capable of obstructing the agency's performance in settling land disputes in Gorontalo province.

Keywords: Settlement of Land Dispute, State Land Agency, Gorontalo Province.

